

ABSTRAK

Pelaksanaan serah terima Protokol Notaris sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara tertib oleh Notaris yang telah Werda kepada Notaris Penerima Protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah setempat, hal mana akan menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan Werda Notaris tersebut, dikarenakan Werda Notaris sudah tidak bisa menjalankan Tugas dan Kewenangannya sebagai Pejabat Notaris. Padahal, Protokol Notaris merupakan Arsip Negara dan Notaris diberikan kewajiban untuk menjaga dan merawat protokol notaris dengan baik, untuk kepentingan pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol dan bagaimanakah pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol dan untuk menganalisis pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat) dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dengan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak dilakukannya serah terima Protokol Notaris tersebut baik kerugian materiel dan kerugian imateriel, dapat membuat dan mengajukan laporan kepada MPD setempat terkait hal tidak diserahkannya Protokol Notaris tersebut dan/atau dapat mengajukan upaya gugatan kepada Notaris atau pihak yang bersangkutan terkait PMH, atas dasar tidak dilaksanakannya suatu kewajiban Notaris yang telah ditetapkan oleh UUJN, hal tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkepentingan atas Protokol Notaris tersebut. Adapun usulan terhadap pembaharuan UUJN terkait penambahan ketentuan kewenangan MPD setempat untuk dapat melakukan serah terima protokol secara sepihak kepada Notaris Penerima Protokol dan pemberian sanksi terhadap pelanggarnya bisa dijadikan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, karena penerapan sanksi tersebut merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif kepada masyarakat, karena penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris merupakan bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Negara melalui UUJN kepada Jabatan Notaris dalam konteks penafsiran dan interpretasi untuk menjaga nilai-nilai moral dari suatu Jabatan Notaris

Kata Kunci : Werda Notaris, Protokol Notaris

ABSTRACT

The implementation of the handover of the Notary Protocol until now has not been carried out in an orderly manner by the Notary who has Werda to the Notary Recipient of the Protocol before the local Regional Supervisory Council, which will cause difficulties for people who have a legal relationship with the Notary Werda, because the Notary Werda is no longer able to carry out In fact, the Notary Protocol is a State Archive because the Notary is appointed and dismissed by the State and the Notary is also given the obligation to maintain and care for the Notary protocol properly, so that it can provide convenience for the community. interested parties to access the notarial protocol. The problem raised in writing this thesis is how is the legal protection for the community over the legal vacuum of the legal rules of Werda Notaries who do not report and submit Notary Protocols to Notary Recipients of the Protocol and what are the arrangements regarding legal sanctions against Werda Notaries who do not report and submit Notary Protocols to Notaries Protocol Receiver. The purpose of this thesis research is to analyze legal protection for the community over the legal vacuum of the legal rules of Werda Notaries who do not report and submit Notary Protocols to Notary Recipients of the Protocol and to analyze arrangements related to legal sanctions against Werda Notaries who do not report and submit Notary Protocols to Notaries Protocol Receiver. This research method uses normative juridical research. The approach in this research is the Statute Approach. The type of data used in this study is primary legal material, namely research material consisting of legislation, jurisprudence or court decisions and international agreements (treaties) and secondary legal materials in the form of research results by interviews. The analysis used in this research is qualitative analysis. The conclusion of this study is that people who feel aggrieved due to the non-handover of the Notary Protocol, both material and immaterial losses, can make and submit a report to the local MPD regarding the non-submission of the Notary Protocol and/or can file a lawsuit against the Notary or other parties. concerned regarding PMH, on the basis of non-implementation of a Notary's obligation that has been stipulated by the UUJN, this is a form of legal protection for the public with an interest in the Notary Protocol. The proposal for updating the UUJN related to the addition of local MPD authority provisions to be able to unilaterally hand over the protocol to the Notary Recipient of the Protocol and imposing sanctions on violators can be used as a solution to address this problem, because the application of these sanctions is part of a form of repressive legal protection for society, because the storage and maintenance of the Notary Protocol is a form of responsibility given by the State through UUJN to the Notary Office in the context of interpretation and interpretation to maintain the moral values of a Notary Office

Keywords: Werda Notary, Notary Protocol